



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KETUA BPK RI
PADA ACARA
FORUM “BPK MENDENGAR”
KAMIS, 13 JANUARI 2011**

Yth. Wakil Ketua, dan Para Anggota BPK

Yth. Menteri Dalam Negeri,

Yth. Para Nara Sumber,

Yth. Sekjen, Para Tortama, Irtama, dan Para Kaditama

Yth. Para pejabat Eselon II dan III, serta

hadirin yang saya muliakan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi, dan Salam sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Pertama-tama, marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara Forum “**BPK Mendengar**” di Auditorium BPK. Mudah-mudahan acara ini mengawali keberkahan dan kesuksesan yang akan kita raih selama tahun 2011. Kami juga

mengucapkan terima kasih atas kesediaan para nara sumber yang hadir pada hari ini untuk memberikan masukan kepada BPK.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Forum “**BPK Mendengar**” yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka peringatan HUT Ke-64 BPK. Acara hari ini merupakan yang kedua kali kami selenggarakan setelah yang pertama pada tahun lalu.

Sesuai dengan UUD 1945, tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam kurun waktu 64 tahun, BPK sudah berusaha melaksanakan amanah tersebut dengan dinamika perkembangannya sesuai dengan fase perkembangan negara dan bangsa Indonesia.

Pada perkembangannya dewasa ini, BPK telah mampu meningkatkan kualitas proses pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya. BPK telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) secara reguler dan tepat waktu. IHPS tersebut telah menjadi salah satu dokumen yang sangat diperlukan tidak saja oleh DPR, DPD, dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya, tetapi juga oleh masyarakat, media masa, dan pemilik kepentingan lain dalam melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah juga menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai alat dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK juga bersyukur bahwa saat ini opini BPK telah mampu menjadi salah satu tolok ukur dan sinyal keberhasilan bagi suatu entitas dalam menjalankan roda organisasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila saat ini semua entitas di tingkat pusat maupun daerah berlomba untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Fenomena ini menjadi salah satu bukti keberhasilan BPK dalam membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan negara dan daerah yang baik dan benar.

Demikian pula bagi penegak hukum, laporan BPK menjadi masukan yang sangat penting untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Saat ini, sebagian besar permasalahan tindak pidana korupsi yang maju ke meja hijau, awalnya berasal dari temuan laporan hasil pemeriksaan BPK.

BPK berharap dengan semua perkembangan tersebut, BPK mampu mendorong perwujudan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Jika dapat terwujud, maka harapan bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tujuan negara dapat lebih cepat tercapai.

Saudara-saudara sekalian yang kami hormati,

Berbagai permasalahan bangsa ini tidak mungkin diselesaikan oleh kita secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, BPK telah memprakarsai pembentukan sinergi antara BPK dengan lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga dan kementerian di bawah Presiden yang kami sebut dengan BPK Sinergi.

Pembentukan sinergi tersebut berupa pembentukan pusat data BPK yang merupakan gabungan data internal BPK dan data-data yang dimiliki *auditee*, meliputi baik data keuangan maupun non keuangan. Dengan pembentukan pusat data melalui *link and match* yang dilakukan secara elektronik tersebut, nantinya BPK dapat melakukan pemeriksaan secara elektronik (*e-audit*). Hal ini akan mempermudah dan mengefektifkan proses pemeriksaan, sehingga hasilnya juga dapat lebih mudah dan cepat untuk memperbaiki berbagai kelemahan pengelolaan keuangan oleh *auditee*.

BPK mengharapkan melalui BPK Sinergi tersebut akan memberikan manfaat yaitu: 1) mengurangi KKN secara sistemik; 2) mendukung optimalisasi penerimaan negara; 3) mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara; 4) mengoptimalkan tindak lanjut temuan BPK; dan 5) mengoptimalkan pemeriksaan kinerja. Sampai dengan saat ini, sudah ada 39 entitas yang terdiri dari 6 lembaga negara, 15 kementerian, 4 BUMN, BI, LPS, dan PPATK yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan BPK dalam kerangka pembentukan pusat data BPK.

Kami menyadari, meskipun sudah banyak yang kami lakukan untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara, namun masih banyak kelemahan yang kami miliki. Untuk itu, pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan masukan, penilaian, bahkan kritik yang paling pedas dari berbagai kalangan pemilik kepentingan, yang diwakili oleh para nara sumber yang hadir pada hari ini. Secara langsung kami ingin mengetahui harapan dan kebutuhan para pemilik kepentingan kepada BPK, serta sejauh mana hasil pemeriksaan BPK memberi mafaat atau dapat dimanfaatkan oleh para pemilik kepentingan.

Kepada jajaran BPK baik pimpinan BPK maupun para pelaksana BPK, saya meminta untuk mendengarkan masukan dan kritikan dari para nara sumber. Mudah-mudahan melalui masukan tersebut kita dapat memperbaiki cara kerja kita ke depan. Semua itu, dalam rangka perbaikan langkah kita untuk mengawal pencapaian tujuan bernegara yaitu masyarakat adil dan makmur.

Demikian sambutan saya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan masukan pemikiran dari para nara sumber. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami bisa menjadi amal baik yang mendapat balasan dari Allah SWT. Demikian pula bagi kami jajaran BPK bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya, sehingga dapat menjadi amal baik pula bagi kami.

Wabillahi taufik walhidayah,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oom Ćanti Ćanti Ćanti Oom

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Drs. Hadi Poernomo, Ak.